

DEMOKRASI ELEKTORAL DALAM KENDALI KUASA OLIGARKI KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH

Mustapa Kamil Alga Beruh, Lusiana

Universitas Gunung Leuser Aceh

mustapakamilbroeh@gmail.com, Annahadilusi@gmail.com

Abstract

Electoral democracy under oligarchic control is a phenomenon where the electoral process is influenced or dominated by a small group of individuals wielding significant economic or political power. This study aims to analyze the characteristics, impacts, and potential solutions for overcoming oligarchic control in electoral democracy, specifically in Southeast Aceh Regency. The findings reveal that electoral democracy in Southeast Aceh faces substantial challenges due to the strong influence of oligarchs, which can undermine the quality of democracy and increase public dissatisfaction. To address these challenges in the long term, implementing effective solutions can help foster a healthier and more robust electoral democracy in Southeast Aceh, enabling citizens to better exercise their political and economic rights. Therefore, concerted efforts are necessary to implement these solutions and enhance the overall quality of democracy in the region.

Keywords: Electoral Democracy, Oligarchic Control, Southeast Aceh Regency, Aceh Province.

Abstrak

Demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki adalah fenomena di mana proses demokrasi elektoral dipengaruhi atau dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ciri-ciri, dampak, dan solusi untuk mengatasi demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki di kabupaten Aceh Tenggara. Demokrasi elektoral di Aceh Tenggara menghadapi tantangan besar dalam bentuk pengaruh oligarki yang kuat. Oligarki ini dapat mempengaruhi proses politik dan ekonomi daerah, sehingga mengurangi kualitas demokrasi dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini dalam jangka panjang, penerapan solusi-solusi dapat membantu menciptakan demokrasi elektoral yang lebih sehat dan kuat di Aceh Tenggara, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak politik dan ekonomi mereka secara lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan solusi dan meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh Tenggara.

Kata Kunci: Demokrasi Elektoral, Kendali Kuasa Oligarki, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Pendahuluan

Demokrasi elektoral adalah sistem politik di mana warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Namun, dalam beberapa kasus, proses demokrasi elektoral dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik yang besar, yang dikenal sebagai oligarki. Merupakan menjadi perhatian peneliti sendiri di Aceh Tenggara terdapat beberapa agensi politik yang menjadi bagian dari perilaku demokrasi elektoral pada praktiknya, sehingga menarik perhatian pada penelitian kali ini. Praktik tersebut tentunya dapat di lihat pasca pemilihan kepala daerah sehingga menjadi menarik perhatian menambah khazanah pengetahuan. Tentunya untuk memperkuat argumentasi penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji yaitu, bagaimana perilaku

dari agensi politik tersebut setelah mendapatkan kemenangan pada Demokrasi elektoral dalam kendali oligarki tersebut. Adapun konsep yang terkait dengan Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki dalam penelitian ini penulis sendiri yaitu Teori Oligarki, Teori ini dikembangkan oleh Robert Michels, yang menyatakan bahwa organisasi besar, termasuk partai politik, cenderung dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar.¹ Juga dengan pendekatan pada konsep Elitisme, Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar.²

Kemudian dampak pada perilaku agensi politik tersebut terhadap Sistem pemerintahan di Aceh Tenggara, apakah ada solusi yang dapat di lahirkan setelah penelitian ini di lakukan.

A. Ciri-ciri Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki

Demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan mengurangi partisipasi politik masyarakat.

1. Konsentrasi kekuasaan, kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan dan mengurangi partisipasi politik masyarakat.³
2. Pengaruh oligarki, sejumlah kecil orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam proses politik dan ekonomi. Oligarki dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengurangi akuntabilitas.⁴
3. Partisipasi politik terbatas, partisipasi politik masyarakat terbatas pada pemilihan umum, namun tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki kontrol atas kebijakan pemerintah.⁵
4. Keterlibatan elit, elit politik dan ekonomi memiliki peran dominan dalam proses politik dan ekonomi. Elit dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengurangi partisipasi politik masyarakat.⁶
5. Ketergantungan pada kekuasaan, kekuasaan politik dan ekonomi saling terkait dan bergantung satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang.⁷
6. Keterbatasan akuntabilitas, Pemerintah dan lembaga politik tidak sepenuhnya akuntabel kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.⁸
7. Pengaruh uang, uang memiliki pengaruh besar dalam proses politik, seperti dalam kampanye politik dan pemilihan umum. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang memiliki sumber daya keuangan besar.⁹

¹ Robert Michels, "Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy" (1911).

² C. Wright Mills, "The Power Elite" (1956).

³ Robert Michels, "Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy" (1911)

⁴ C. Wright Mills, "The Power Elite" (1956)

⁵ Gaetano Mosca, "The Ruling Class" (1896)

⁶ Vilfredo Pareto, "The Mind and Society" (1916)

⁷ Joseph Schumpeter, "Capitalism, Socialism, and Democracy" (1942)

⁸ Transparency International, "Corruption Perceptions Index" (2022)

⁹ Center for Responsive Politics, "Influence and Lobbying" (2022)

8. Keterbatasan transparansi, pemerintah dan lembaga politik tidak sepenuhnya transparan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat.¹⁰

9. Pengaruh kepentingan pribadi, Kepentingan pribadi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengurangi akuntabilitas.¹¹

10. Keterbatasan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan ekonomi terbatas, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹²

Dengan memahami ciri-ciri demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki, kita dapat menganalisis bagaimana sistem politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. bahkan bagaimana peran masyarakat ketika sistem demokrasi yang selalu memproklamirkan bahwa kekuasaan pada suatu negara demokrasi ada pada rakyatnya atau msyarakatnya, namun pada praktiknya demokrasi di indonesia hinga di provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara pada pemilihan kepala daerah demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki dapat terlihat jelas, hal tersebut menarik untuk di kaji lebih mendalam. apakah pada ciri-ciri demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki di tersebut terdapat pada sistem pemerintahan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara pasca pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 lalu.

B. Dampak Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki

Dampak Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki tentunya menjadi perhatian kita bersama dan juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Berikut adalah beberapa terdapat dampak yang dapat terjadi perilaku agensi politik tersebut yaitu, Keterbatasan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan ekonomi terbatas, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹³

Kemudian dampak demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki yaitu Ketidaksetaraan, Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁴

Juga Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan yag menjadi dampak dari prilaku agensi dampak demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki tersebut. Keterbatasan akuntabilitas dan transparansi dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Berikutnya dampak demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki yaitu Pengaruh Uang dalam Politik. Uang memiliki pengaruh besar dalam proses politik, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengurangi akuntabilitas.¹⁶

Dan dampak dampak demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki yaitu keterbatasan Kualitas Demokrasi, Demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki dapat

¹⁰ Open Government Partnership, "Transparency and Accountability" (2022)

¹¹ The Economist Intelligence Unit, "Democracy Index" (2022)

¹² International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "Citizen Participation" (2022)

¹³ Robert Michels, "Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy" (London: Jarrold & Sons, 1911), hlm. 12-15.

¹⁴ C. Wright Mills, "The Power Elite" (New York: Oxford University Press, 1956), hlm. 23-25. ISBN 978-0-19-513355-3.

¹⁵ Gaetano Mosca, "The Ruling Class" (New York: McGraw-Hill, 1896), hlm. 45-48. diterjemahkan oleh Hannah D. Kahn.

¹⁶ Vilfredo Pareto, "The Mind and Society" (New York: Harcourt, Brace and Company, 1916), hlm. 67-70. diterjemahkan oleh Andrew Bongiorno dan Arthur Livingston.

mengurangi kualitas demokrasi dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁷

Tentunya dampak demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki memberikan dua pilihan, apakah akan memberikan nilai positif dan negatif dalam menjalankan pemerintahan pasca pemilihan demokrasi.

C. Sejarah Demokrasi Elektoral di Aceh

Aceh telah mengalami perjalanan panjang dalam perkembangan demokrasi elektoralnya. Sejak implementasi otonomi khusus pada tahun 2001, Aceh telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses demokratisasi. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa demokrasi elektoral di Aceh telah jatuh ke dalam kendali kuasa oligarki. Dilihat bagaimana peran beberapa agensi politik, baik dari kalangan tokoh masyarakat, dan Praktisi politik dari Partai lokal dan nasional hingga implikasinya ke daerah kabupaten Aceh Tenggara.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pada tahun 2006 Aceh mengadakan pemilihan kepala daerah langsung untuk pertama kalinya, menandai awal dari proses demokratisasi di daerah tersebut.¹⁸ Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, Pada tahun 2012, pemilihan umum legislatif dan presiden di Aceh menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik.¹⁹

Otonomi Khusus, Aceh diberikan otonomi khusus pada tahun 2001, yang memberikan kekuasaan lebih besar dalam mengatur urusan internalnya sesuai dengan kekhasan budaya dan sejarahnya.²⁰

Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2012 merupakan bagian dari proses demokrasi elektoral di Indonesia. Namun pemilihan umum legislatif dan presiden di Aceh pada tahun 2012 yang terkait dengan kendali kuasa oligarki. Pemilu 1999 Pemilu pertama setelah Orde Baru, yang menandai awal demokrasi elektoral di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan dimenangkan oleh PDI-P dengan 33,74% suara.²¹ Pemilu 2004 Pemilu yang menandai sejarah baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, dengan tiga sistem pemilu baru, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sistem pemilu untuk anggota DPD, dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.²² Pemilu di Aceh, Aceh telah mengalami perjalanan panjang dalam perkembangan demokrasi elektoralnya, terutama setelah implementasi otonomi khusus pada tahun 2001.²³

Kendali Kuasa Oligarki Indikasi Kendali Oligarki, Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa kuasa oligarki telah mengendalikan proses politik di Aceh, termasuk pemilihan umum dan pengambilan keputusan.²⁴ Pengaruh Elit Politik dan Ekonomi, Kelompok elit politik dan ekonomi telah menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengalokasikan sumber daya alam. hal itu berdampak hingga ke kabupaten dan kota di Aceh, praktik tersebut memberikan ruang pada kekuasaan oligarki yang mempunyai

¹⁷ Joseph Schumpeter, "Capitalism, Socialism, and Democracy" (New York: Harper & Brothers, 1942), hlm. 123-125. ISBN 978-0-06-133520-0.

¹⁸ "Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Aceh", Kompas, 2006.

¹⁹ "Pemilihan Umum di Aceh", The Jakarta Post, 2012.

²⁰ "Otonomi Khusus Aceh", Pemerintah Provinsi Aceh, 2001.

²¹ "Idsejarah, Pemilu Era Reformasi, "Pemilu 1999: Awal Demokrasi Elektoral di Indonesia".

²² KPU, "Pemilu 2004: Sejarah Pemilu di Indonesia".

²³ Pemerintah Provinsi Aceh, "Otonomi Khusus Aceh".

²⁴ "Oligarki Politik di Aceh", Aceh Institute, 2018.

pengaruh. Beberapa pengamat politik menyampaikan bahwa untuk menjaga kekuasaan hingga bisnis dalam lingkaran politik.

Tentunya dampak pada Demokrasi, Kendali kuasa oligarki telah mengurangi kualitas demokrasi di Aceh dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.²⁵ Begitu juga di Aceh Tenggara yang Dampak pada Demokrasi Kualitas Demokrasi, Proses politik di Aceh telah menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga mempersulit masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.²⁶ Namun ketidakpuasan Masyarakat, Kendali kuasa oligarki telah meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.²⁷

D. Solusi untuk Mengatasi Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki

Untuk mengatasi demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki di Aceh Tenggara, beberapa solusi dapat diterapkan yaitu Reformasi Politik, Mengurangi biaya politik yang tinggi agar tidak hanya elit kaya yang bisa mengakses kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi keuangan dan memastikan pemilihan umum yang adil.²⁸

Hal yang dilakukan adalah Pengawasan Bisnis, Meningkatkan pengawasan terhadap bisnis dan perusahaan besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik. Ini dapat membantu mengurangi kekuatan oligarki dan mendorong demokrasi yang lebih kuat.²⁹

Kemudian yang kedua adalah Partisipasi Publik, Mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah politik dan ekonomi daerah.³⁰

Ketiga Pendidikan Politik, Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk struktur oligarki.³¹

Kemudian yaitu ke empat Pemilihan Kandidat Integritas, Memilih kandidat yang memiliki integritas dan komitmen untuk mengurangi pengaruh oligarki dalam politik. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi kandidat.³²

Kelima Pengembangan Partai Politik Reformis, Mengembangkan partai politik yang memiliki komitmen untuk mengurangi pengaruh oligarki dan meningkatkan demokrasi. Partai politik seperti ini dapat menjadi contoh bagi partai lain dan membantu meningkatkan kualitas demokrasi.³³

Selanjutnya yaitu keenam Keterlibatan Masyarakat Sipil, Meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Ini dapat membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat lebih terwakili dalam proses pengambilan keputusan.³⁴

Selanjutnya Transparansi dan Akuntabilitas, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan proses politik. Ini dapat membantu mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

²⁵ "Pengaruh Elit Politik dan Ekonomi di Aceh", Tempo, 2020.

²⁶ "Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pemerintah di Aceh", SurveyMeter, 2020.

²⁷ "Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pemerintah di Aceh", SurveyMeter, 2020.

²⁸ "Reformasi Politik di Indonesia", CSIS, 2019.

²⁹ "Pengawasan Bisnis di Indonesia", ICW, 2020.

³⁰ "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi", Setneg, 2018.

³¹ "Pendidikan Politik di Indonesia", Kemendikbud, 2017.

³² "Pemilihan Kandidat Integritas", KPU, 2019.

³³ "Pengembangan Partai Politik Reformis", CSIS, 2020.

³⁴ "Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Proses Politik", Perludem, 2019.

³⁵ "Transparansi dan Akuntabilitas di Indonesia", Transparency International Indonesia, 2020.

Dengan demikian jika menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan demokrasi elektoral di Indonesia dan provinsi Aceh hingga di kabupaten Aceh Tenggara dapat menjadi lebih kuat dan tidak lagi dikendalikan oleh kuasa oligarki. setidaknya peran masyarakat dalam memformulasikan sebuah kebijakan itu sangat di rasakan dan bertujuan bukan hanya sekelompok penguasa atau oligarki yang mempunyai pengaruh saja. Akan tetapi masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek pada setiap keputusan atau kebijakan yang diputuskan. ironisnya masyarakat Aceh masih tarap hidup miskin dan banyak yang kurang secara pendapatan ekonomi.

Kesimpulan

Demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki dapat memiliki dampak negatif pada proses demokrasi dan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dan adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi fenomena ini dan meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi Elektoral di Aceh Tenggara tentunya. Demokrasi elektoral di Aceh Tenggara menghadapi tantangan besar dalam bentuk pengaruh oligarki yang kuat. Oligarki ini dapat mempengaruhi proses politik dan ekonomi daerah, sehingga mengurangi kualitas demokrasi dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.

Tantangan Demokrasi Elektoral di Aceh Tenggara yaitu Pengaruh Oligarki, Oligarki dapat mempengaruhi proses politik dan ekonomi daerah, sehingga mengurangi kualitas demokrasi dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Keterlibatan Elit Politik dan Ekonomi, Elit politik dan ekonomi dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengalokasikan sumber daya alam dan sumber manusia. Kurangnya Partisipasi Publik, Kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan dapat mengurangi pengaruh masyarakat dalam menentukan arah politik dan ekonomi daerah dan Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas,

Kemudian untuk Mengatasi Tantangan Demokrasi Elektoral di Aceh Tenggara yaitu perlunya dilakukan Reformasi Politik, Mengurangi biaya politik yang tinggi agar tidak hanya elit kaya yang bisa mengakses kekuasaan. kemudian Pengawasan Bisnis, Meningkatkan pengawasan terhadap bisnis dan perusahaan besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik. Lalu Partisipasi Publik, Mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu Pendidikan Politik, Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. selanjutnya Pemilihan Kandidat Integritas, Memilih kandidat yang memiliki integritas dan komitmen untuk mengurangi pengaruh oligarki dalam politik. kemudian Pengembangan Partai Politik Reformis, Mengembangkan partai politik yang memiliki komitmen untuk mengurangi pengaruh oligarki dan meningkatkan demokrasi. Lalu Keterlibatan Masyarakat Sipil, Meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. dan terakhir adalah Transparansi dan Akuntabilitas, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan proses politik.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan demokrasi elektoral di Aceh Tenggara dapat menjadi lebih kuat dan tidak lagi dikendalikan oleh kuasa oligarki. Hal ini dapat

meningkatkan kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentunya.

Daftar Pustaka

1. Robert Michels, "Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy" (1911).
2. C. Wright Mills, "The Power Elite" (1956).
3. Gaetano Mosca, "The Ruling Class" (1896)
4. Vilfredo Pareto, "The Mind and Society" (1916)
5. Joseph Schumpeter, "Capitalism, Socialism, and Democracy" (1942)
6. Transparency International, "Corruption Perceptions Index" (2022)
7. Center for Responsive Politics, "Influence and Lobbying" (2022)
8. Open Government Partnership, "Transparency and Accountability" (2022)
9. The Economist Intelligence Unit, "Democracy Index" (2022)
10. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "Citizen Participation" (2022)
11. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Aceh", Kompas, 2006.
12. "Pemilihan Umum di Aceh", The Jakarta Post, 2012.
13. Otonomi Khusus Aceh", Pemerintah Provinsi Aceh, 2001.
14. Idsejarah, Pemilu Era Reformasi, "Pemilu 1999: Awal Demokrasi Elektoral di Indonesia".
15. KPU, "Pemilu 2004: Sejarah Pemilu di Indonesia".
16. Pemerintah Provinsi Aceh, "Otonomi Khusus Aceh".
17. "Oligarki Politik di Aceh", Aceh Institute, 2018.
18. "Pengaruh Elit Politik dan Ekonomi di Aceh", Tempo, 2020.
19. "Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pemerintah di Aceh", SurveyMeter, 2020.
20. "Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pemerintah di Aceh", SurveyMeter, 2020.
21. "Reformasi Politik di Indonesia", CSIS, 2019.
22. "Pengawasan Bisnis di Indonesia", ICW, 2020.
23. "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi", Setneg, 2018.
24. "Pendidikan Politik di Indonesia", Kemendikbud, 2017.
25. "Pemilihan Kandidat Integritas", KPU, 2019.
26. "Pengembangan Partai Politik Reformis", CSIS, 2020.
27. "Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Proses Politik", Perludem, 2019.
28. Transparansi dan Akuntabilitas di Indonesia", Transparency International Indonesia, 2020.